

ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO

Fahrul Vicky Anggiawan

NPP. 30.0667

Asdaf Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Program

Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: fahrulvickya@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Agung Nurrahman, S.STP, M.PA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Publication of government information plays a very important role because it can increase the level of government transparency, encourage public participation in important decisions made by the government, provide access to the latest information from the government, and increase government accountability. In one word, the publication of government information is very important in increasing government openness, participation and accountability. This will help achieve the goals of an inclusive state and safeguard the welfare of its people. **Purpose:** This study aims to find out how to optimize the publication of government information through social media in Sukoharjo Regency. **Method:** This research model uses qualitative research with descriptive methods. Researchers conducted interviews, observations, and documentation at the research location as a data collection technique. In this study, researchers used Mass Communication Theory by Denis Mcquail with the dimensions of Structure, Organizations, Content, Audiences, and Effects. **Result:** The influence generated by the social media of the Government of Sukoharjo Regency can be either positive or negative. Most people get a positive influence from the information they get. Meanwhile, there are still those who comment negatively regarding uploads from the social media of the Sukoharjo Regency Government. **Conclusion:** The community is very sensitive to the information provided by the Sukoharjo District Government through its social media. The public is able to see the gaps in mistakes made by social media managers and convey them through the comments column on each upload. Most people get a positive influence on the information submitted by the Government of Sukoharjo Regency. However, the public still sees political issues which are sometimes implied in some of the uploaded information.

Keywords: Information, Social Media, Public Services.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Publikasi informasi pemerintahan memainkan peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan tingkat transparansi pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat dalam keputusan penting yang dibuat pemerintah, memberikan akses informasi terbaru dari pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dalam satu kata, publikasi informasi pemerintahan sangat penting dalam meningkatkan keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal tersebut akan membantu mencapai tujuan-tujuan dari negara yang inklusif dan menjaga kesejahteraan rakyatnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengoptimalkan publikasi informasi pemerintahan melalui media sosial di Kabupaten Sukoharjo. **Metode:** Model penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada lokasi penelitian sebagai teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Komunikasi Massa oleh Denis Mcquail dengan dimensi Structure, Organizations, Content, Audiences, dan Effects. **Hasil/Temuan:** Pengaruh yang dihasilkan media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat berupa pengaruh positif atau negatif. Sebagian besar masyarakat mendapat pengaruh positif dari informasi yang di dapat. Sementara itu, masih ada yang berkomentar negatif terkait unggahan dari media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. **Kesimpulan:** Masyarakat sangat peka terhadap informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui media sosialnya. Masyarakat mampu melihat celah-celah kesalahan yang dilakukan oleh pengelola media sosial dan menyampaikannya lewat kolom komentar di setiap unggahan. Sebagian besar masyarakat mendapatkan pengaruh positif terhadap informasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Namun masyarakat masih melihat isu-isu politik yang terkadang tersirat di beberapa informasi yang diunggah. **Kata Kunci:** Informasi, Media Sosial, Pelayanan Publik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi publik dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang layanan publik. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, informasi publik dapat tersampaikan lebih cepat dan efektif melalui media. Ada banyak media yang dapat diakses masyarakat guna memudahkan masyarakat mendapatkan informasi melalui penggunaan internet. Internet menjadi teknologi yang berkembang pesat sehingga penggunaannya mendapatkan berbagai manfaat dari penggunaan internet. Hal yang berkembang cukup signifikan dengan adanya internet adalah informasi dan komunikasi itu sendiri. Pengguna internet dapat menyebarkan informasi dan berkomunikasi dengan pengguna lain kapan pun dan di mana pun. Sehingga internet menjadi media utama dalam penyebarluasan informasi dan komunikasi. Salah satu media yang menggunakan internet ialah media sosial. Media sosial merupakan sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, berinteraksi, berdiskusi, berkolaborasi dan menciptakan isi dengan berbagai jenis platform yang tersedia.¹ Ada beberapa media sosial populer yang biasa digunakan sehari-hari, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Media-media tersebut merupakan media yang dapat menyebarkan konten-konten, seperti musik, hiburan, informasi, dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga ikut serta dalam penggunaan internet sebagai ujung tombak

¹ Evi Novianti et al., "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran)," *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 11, no. 1 (2020): 48–59, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir>.

penyebarluasan informasi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggunakan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang agenda-agenda pemerintah yang sudah dijalankan. Media sosial merupakan media yang dapat menghubungkan seseorang dengan banyak orang sekaligus sehingga proses penyebarluasan dan pertukaran informasi menjadi sangat cepat.

Komunikasi dan informatika merupakan salah satu Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pemerintah Daerah dapat menggunakan teknologi sebagai media komunikasi dan informasi. Hal ini juga merupakan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 349 ayat 3 yang berbunyi, “Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik”. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Republik Indonesia menjamin hak warga negara atas informasi publik. Pasal 3 ayat a pada undang-undang tersebut berbunyi, “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik”. Pemerintah Daerah juga ikut serta dalam keterbukaan informasi publik. Informasi publik dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang layanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 Ayat 2, bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Permasalahan yang timbul adalah belum optimalnya penggunaan media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum konsisten dalam penerapan publikasi informasi melalui media sosial. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO” yang akan dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah pada skripsi mengenai media sosial pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat mencakup beberapa hal berikut: Aksesibilitas Pemerintah: Terdapat kesenjangan dalam aksesibilitas pemerintah melalui media sosial. Beberapa wilayah mungkin menghadapi keterbatasan akses internet atau ketidakmampuan dalam menggunakan teknologi. Ini dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat menggunakan media sosial. Partisipasi Masyarakat: Terdapat kesenjangan dalam partisipasi masyarakat dalam penggunaan media sosial pemerintah. Mungkin ada kelompok masyarakat yang kurang aktif atau tidak tertarik berpartisipasi dalam platform media sosial pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya kehadiran masyarakat dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Konten dan Informasi yang Disampaikan: Terdapat kesenjangan dalam isi konten dan informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah. Mungkin ada kurangnya keragaman topik yang dibahas atau kurangnya ketepatan waktu dalam menyampaikan informasi penting. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan berdampak negatif pada citra pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Inklusivitas: Terdapat kesenjangan dalam inklusivitas dalam pemanfaatan media sosial pemerintah. Misalnya, perempuan atau kelompok minoritas mungkin menghadapi hambatan dalam akses media sosial atau mengungkapkan pendapat mereka. Hal ini dapat mengurangi representasi dan partisipasi kelompok-kelompok tersebut dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Keamanan dan Privasi Data:

Terdapat kesenjangan dalam keamanan dan privasi data pengguna media sosial pemerintah. Kemungkinan adanya pelanggaran keamanan dan penyalahgunaan data dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat pemanfaatan media sosial pemerintah sebagai saluran komunikasi yang efektif. Evaluasi dan Pengukuran: Terdapat kesenjangan dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas media sosial pemerintah. Mungkin tidak ada kerangka evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilan dan dampak dari strategi media sosial pemerintah. Ini dapat menghambat kemampuan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk kepentingan masyarakat. Untuk menentukan kesenjangan masalah yang berlaku, penulis skripsi harus melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut, seperti melalui survei, wawancara, atau studi literatur yang lebih mendalam.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga sampel penelitian sebelumnya yang menjadi perbandingan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian yang pertama, skripsi oleh Afandi bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap interaksi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial Instagram memiliki pengaruh yang signifikan terhadap interaksi sosial. Semakin sering individu menggunakan Instagram, semakin rendah interaksi sosial face-to-face yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan individu lebih fokus pada interaksi online melalui platform media sosial daripada menghabiskan waktu bersama secara langsung. Instagram mempengaruhi jenis interaksi sosial yang muncul. Interaksi di media sosial ini cenderung menjadi lebih permukaan dan terbatas pada komentar, like, dan direct message. Interaksi tersebut sering kali kurang kaya informasi dan keintiman dibandingkan dengan interaksi face-to-face. Penggunaan Instagram juga memiliki efek emosional terhadap interaksi sosial. Beberapa individu melaporkan merasa cemas, stres, atau tidak aman dalam interaksi sosial face-to-face karena perbandingan diri dan citra yang dihasilkan oleh media sosial. Terdapat perbedaan dalam kualitas hubungan yang dibentuk melalui Instagram. Meskipun individu bisa terhubung dengan banyak orang melalui media sosial ini, hubungan yang terjalin cenderung lebih dangkal dan kurang dalam secara emosional.

Putri dkk meneliti tentang Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja.³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi dari studi kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi sebagai alat pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku remaja pada beberapa aspek. Penggunaan media sosial dapat membawa dampak negatif pada perilaku remaja seperti tingkat kepatuhan yang rendah, peningkatan perilaku agresif, dan eksperimen dengan perilaku yang berisiko. Hal ini dapat disebabkan oleh paparan remaja terhadap konten yang negatif atau menyimpang di media sosial. Media sosial juga mempengaruhi cara remaja berinteraksi

² Ikhwan Afandi, "Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Interaksi Sosial (Studi Kasus Pada Remaja Usia 16-19 Tahun Di Wilayah Kelurahan ...," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020, [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51042%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51042/1/1113015000067_Ikhwan Afandi - Ikhwan Afandi.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51042%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51042/1/1113015000067_Ikhwan%20Afandi%20-%20Ikhwan%20Afandi.pdf).

³ Wilga Secsio Ratsja Putri, Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti S., "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2016).

dengan orang lain, baik secara online maupun offline. Remaja yang menghabiskan banyak waktu di media sosial cenderung kurang memiliki keterampilan sosial dan kesulitan dalam berinteraksi secara langsung dengan orang lain.

Penggunaan media sosial dapat mempengaruhi citra diri dan kepercayaan diri remaja. Remaja sering berusaha untuk menciptakan citra positif di media sosial, yang dapat mengarah pada tekanan untuk menampilkan diri secara sempurna dan ketergantungan pada validasi dari reaksi orang lain terhadap penampilan mereka. Terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dengan masalah kesehatan mental pada remaja, seperti peningkatan kecemasan, depresi, dan perasaan kurang berharga. Hal ini dapat disebabkan oleh perbandingan sosial, cyberbullying, dan paparan terhadap konten yang tidak sehat atau merugikan di media sosial.

Penelitian ketiga, yaitu Jurnal karya Sugeng, Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial yang terjadi di Indonesia.⁴ Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam mengubah perilaku dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Beberapa temuan kunci dari jurnal ini adalah media sosial telah mengubah cara komunikasi dan interaksi antarindividu. Masyarakat Indonesia lebih cenderung berkomunikasi melalui platform media sosial daripada secara langsung. Ini telah mengubah dinamika dan intensitas relasi sosial di masyarakat. Media sosial telah meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat Indonesia. Informasi politik kini lebih mudah diakses dan dishare melalui media sosial, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan mengekspresikan pendapat mereka secara lebih terbuka tentang isu-isu politik. Media sosial telah mempengaruhi dan bahkan mengubah identitas budaya dan gaya hidup di masyarakat Indonesia. Dengan eksposur yang lebih besar terhadap budaya dan tren dunia melalui media sosial, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh asing dan terjadi perubahan dalam preferensi budaya dan konsumsi. Media sosial memberikan platform untuk pemberdayaan sosial masyarakat Indonesia. Kelompok-kelompok aktivis dan individu dapat menggunakan media sosial untuk mengadvokasi isu-isu sosial, menggalang dukungan, dan mengorganisir gerakan sosial dengan cepat dan efektif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengaruh media sosial terhadap masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan oleh penulis berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu Teori Komunikasi Massa menurut Denis McQuail⁵), dimana dimensi yang digunakan meliputi *Structure, Organizations, Content, Audiences, Effects*.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengoptimalkan publikasi informasi pemerintahan melalui media sosial di Kabupaten Sukoharjo.

⁴ Sugeng Cahyono Anang, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal ilmu sosial & ilmu politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung* 9, no. 1 (2016): 140–157, <http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73>.

⁵ Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, 6th ed. (Sage Publication Ltd, 2010).

II. METODE

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁶ Sugiyono juga mendefinisikan metode deskriptif sebagai salah satu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data penelitian sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik generalisasi atau kesimpulan yang berlaku untuk masyarakat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian pada lokasi yang telah ditentukan oleh penulis telah selesai dilaksanakan. Dari pelaksanaan penelitian tersebut penulis memperoleh beberapa data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berada di lokasi penelitian. Penyebaran Informasi pemerintahan dilakukan dengan mengunggah kegiatan pemerintahan setiap harinya. Kegiatan tersebut berupa rapat, bantuan sosial, seminar dan sosialisasi, serta pertemuan dan kunjungan oleh pejabat-pejabat pemerintahan.

Berdasarkan Teori Komunikasi Massa Mcquail, dalam publikasi informasi pemerintahan dapat diidentifikasi melalui dimensi yang disebutkan untuk mengetahui tingkat kesiapan organisasi dalam publikasi informasi pemerintahan. Tingkat kesiapan organisasi sangat penting karena merupakan dasar untuk menjalankan tahapan-tahapan selanjutnya dalam optimalisasi publikasi informasi pemerintahan.

Penulis melakukan analisis pengumpulan data menggunakan wawancara yang didasari oleh Teori Komunikasi Massa oleh Denis Mcquail. Landasan teoritis serta hasil evaluasi mampu menggambarkan kesiapan Diskominfo Kabupaten Sukoharjo dalam publikasi informasi pemerintahan sehingga dapat dilakukan optimalisasi agar kualitas informasi menjadi lebih baik. Dalam hal ini penulis menganalisis optimalisasi media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggunakan Teori Komunikasi Massa yang dikemukakan oleh Denis Mquail, menjelaskan bahwa terdapat 5 dimensi, yaitu:

1. Structure
2. Organizations
3. Content
4. Audiences
5. Effects

Informasi dan Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi pendukung berupa profil media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian di Diskominfo Kabupaten Sukoharjo untuk mengetahui publikasi informasi pemerintahan melalui Media Sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Teori Komunikasi Massa Mcquail, dalam publikasi informasi pemerintahan dapat diidentifikasi melalui dimensi yang disebutkan untuk mengetahui tingkat kesiapan organisasi dalam

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

publikasi informasi pemerintahan. Tingkat kesiapan organisasi sangat penting karena merupakan dasar untuk menjalankan tahapan-tahapan selanjutnya dalam optimalisasi publikasi informasi pemerintahan.

Penulis melakukan analisis pengumpulan data menggunakan wawancara yang didasari oleh Teori Komunikasi Massa oleh Denis Mcquail. Landasan teoritis serta hasil evaluasi mampu menggambarkan kesiapan Diskominfo Kabupaten Sukoharjo dalam publikasi informasi pemerintahan sehingga dapat dilakukan optimalisasi agar kualitas informasi menjadi lebih baik. Dalam hal ini penulis menganalisis pengaruh media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggunakan Teori Komunikasi Massa yang dikemukakan oleh Denis Mquail.

3.1. Teori Komunikasi Massa

Berdasarkan Teori Komunikasi Massa Mcquail, dalam publikasi informasi pemerintahan dapat diidentifikasi melalui dimensi yang disebutkan untuk mengetahui tingkat kesiapan organisasi dalam publikasi informasi pemerintahan. Tingkat kesiapan organisasi sangat penting karena merupakan dasar untuk menjalankan tahapan-tahapan selanjutnya dalam optimalisasi publikasi informasi pemerintahan.

Penulis melakukan analisis pengumpulan data menggunakan wawancara yang didasari oleh Teori Komunikasi Massa oleh Denis Mcquail. Landasan teoritis serta hasil evaluasi mampu menggambarkan kesiapan Diskominfo Kabupaten Sukoharjo dalam publikasi informasi pemerintahan sehingga dapat dilakukan optimalisasi agar kualitas informasi menjadi lebih baik. Dalam hal ini penulis menganalisis pengaruh media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggunakan Teori Komunikasi Massa yang dikemukakan oleh Denis Mquail.

3.1.1. Structure

Struktur merujuk pada semua hal yang berkaitan dengan sistem mediasi, meliputi bentuk organisasi dan keuangan, kepemilikan, bentuk regulasi, infrastruktur, fasilitas distribusi, dan seterusnya. Struktur menjadi pondasi utama karena berisi elemen-elemen penting dalam publikasi informasi.

Dalam rangka mendapatkan kualitas informasi suatu media, organisasi perlu melakukan identifikasi terhadap publikasi informasi serta memastikan informasi tersebut valid dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan pemilihan pegawai yang tepat, regulasi yang baik, dan infrastruktur memadai.

Penetapan struktur organisasi di Diskominfo Kabupaten Sukoharjo yang tepat dapat mendukung kualitas informasi pemerintahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjadi daya tarik bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sesuai indikator, mala dapat dianalisis bagaimana kualitas informasi pemerintahan yang dipublikasikan Diskominfo Kabupaten Sukoharjo melalui Media Sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Prinsip akuntabilitas dalam Teori Komunikasi Massa Mquail mengacu pada informasi yang disebarkan melalui media yang dalam hal ini adalah Media Sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini diperlukan untuk menjaga kualitas informasi tetap baik. Dalam konteks publikasi informasi, prinsip akuntabilitas berarti bahwa organisasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya dan transparan kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat. Dalam keterangan informan kepada peneliti, bahwa akurasi dan kebenaran menjadi faktor utama dalam menjaga akuntabilitas dalam memberitakan suatu informasi. Terdapat proses-proses verifikasi sebelum informasi disebarluaskan agar informasi dapat relevan dengan kondisi di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Diskominfo mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam memberitakan sebuah informasi.⁷

Tata kelola keuangan yang baik sangat penting dalam menunjang publikasi informasi. Penyerapan anggaran menjadi kunci jika dana yang dianggarkan sesuai dengan realisasi yang dilakukan. Dalam

⁷ A Suhendar, "Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah & Menuju Good Governance, _," *Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2008).

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yang menganggarkan kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat penurunan rasio antara anggaran dan realisasi dari tahun 2018-2019. Pada tahun 2018 rasio mencapai 99,4% kemudian turun menjadi 82,5% pada tahun 2019. Rata-rata pertumbuhan antara anggaran dan realisasi berada pada angka -1,00. Penyerapan anggaran dalam Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum maksimal dan terjadi penurunan.

Kesimpulan yang didapatkan dari dimensi ini adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik. Prinsip akuntabilitas menjaga kualitas media sosial tetap terjaga. Sementara itu, dari sisi tata kelola keuangan memang media sosial membutuhkan anggaran yang relatif kecil. Namun demikian, anggaran yang relatif kecil tersebut belum sepenuhnya terserap dan mengalami penurunan penyerapan anggaran dari tahun ke tahun.

3.1.2. Organizations

Dalam menunjang publikasi informasi, seringkali terdapat tekanan dan tuntutan yang perlu dihadapi. Untuk mengatasi tekanan dan tuntutan tersebut, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan profesional dari pengelola media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam menghadapi tekanan dan tuntutan yang diterima, pengelola media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga perlu meningkatkan keterampilan dalam menjalin relasi yang baik dan saling menghormati dengan pihak-pihak terkait, sehingga kepentingan semua pihak dapat diakomodasi dengan seimbang.

Pengikut media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki jumlah pengikut yang berbeda-beda. Instagram memiliki jumlah pengikut sekitar 26.100. YouTube memiliki jumlah pengikut sekitar 3.530 pengikut. Sementara Twitter memiliki 5.087 pengikut. Perbedaan jumlah pengikut tersebut selain mayoritas masyarakat menggunakan Instagram, juga disebabkan oleh konten yang sama sehingga masyarakat cenderung mengikuti salah satu media sosial saja

Produksi budaya media memainkan peran penting dalam menunjang publikasi informasi. Berbagai unsur budaya seperti bahasa, simbol, gambar, dan narasi digunakan untuk menciptakan konten yang menarik bagi audiens. Produksi budaya media juga memengaruhi bagaimana informasi disajikan dan diterima oleh publik. Dari dimensi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mampu memproduksi konten media sosial sehingga konsisten namun masih terdapat beberapa kekurangan. Konten-konten yang diproduksi belum mampu menarik perhatian masyarakat sehingga jumlah pengikut di media sosial tergolong rendah. Unggahan yang bersifat duplikasi di setiap media sosial yang berbeda membuat daya tarik media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkurang.

3.1.3. Content

Dimensi ini membahas tentang bagaimana pesan atau informasi yang didengarkan, direspon, serta dikembangkan dan bagaimana hal ini memengaruhi pada lingkungan dan pengguna. Konten-konten yang diunggah di dalam media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merupakan hasil liputan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Informasi seputar pemerintahan juga menjadi topik yang diunggah di media sosial tersebut.

Masalah dalam konten media adalah adanya konten yang tidak akurat, tidak sesuai fakta, tidak berkualitas dan bias. Konten yang tidak akurat dapat menimbulkan kebingungan dalam masyarakat dan mendorong kesalahan pemahaman. Sementara itu, konten yang tidak berkualitas dan bias dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap media itu sendiri.

Konsep konten media meliputi kebenaran, keseimbangan, kualitas, dan kredibilitas. Konten yang memuat informasi yang benar dan akurat sangat penting, untuk itu media harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, keseimbangan dalam penyampaian informasi juga sangat penting, hal ini agar masyarakat dapat memberikan perspektif yang seimbang dari sudut pandang yang berbeda.

Konten berkualitas tinggi juga sangat diperlukan dalam publikasi informasi. Konten yang berkualitas dapat memberikan nilai tambah pada informasi tersebut dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media. Kredibilitas juga menjadi salah satu fokus utama dalam konsep konten media. Kredibilitas media harus selalu dijaga agar masyarakat dapat mempercayai informasi yang diberikan. Dengan menjaga konsep konten media yang baik, media dapat menunjang publikasi informasi yang efektif dan terpercaya kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan pengguna media sosial yang mengikuti media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa mayoritas masyarakat meyakini bahwa media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberitakan sesuai dengan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan media sosial tersebut selalu memberikan informasi yang selalu berimbang dan faktual kepada masyarakat dengan sumber yang dapat dipercaya. Konten media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo cukup memuaskan masyarakat.

Hal ini sesuai seperti pernyataan Puguh Santosa, SE, selaku pengelola media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam wawancara yang dilakukan pada 10 Januari 2023 di ruang Network Operating Center (NOC) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan bahwa pola unggahan sudah ditetapkan agar mudah digunakan dan disunting, serta mudah juga dipahami pengikut media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Genre media adalah kategori atau jenis program atau konten media yang memiliki ciri khas sendiri dan biasanya mengikuti pola-pola tertentu dalam produksi dan presentasi. Sedangkan, Teks dalam mengacu pada konten komunikasi tertulis maupun non-tertulis yang disampaikan oleh media massa. genre media dan teks memiliki peran penting dalam membentuk dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap informasi dan pesan yang disampaikan. Kedua konsep ini harus diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh media massa agar dapat menghasilkan publikasi yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam hal ini yang media sosial menjadi salah satu genre media yang digambarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Dari segi dimensi ini, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mampu membuat konten-konten yang berkualitas dari segi estetika. Namun masih terdapat kendala karena minimnya sumber daya dalam mengelola semua media sosial sehingga dari media sosial YouTube belum mampu konsisten karena unggahan yang digunakan adalah berupa video yang mana perlu proses panjang dalam penyuntingannya

3.1.4. Audiences

Media sosial menjadi media yang sering digunakan oleh masyarakat. Hampir setiap hari masyarakat menggunakan media sosial dalam memenuhi kebutuhan informasi. Media sosial juga memengaruhi perilaku dan pola pikir pengguna serta berdampak pada lingkungan sosial di sekitar.

Media sosial merupakan media daring utama yang digunakan masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan mereka dalam mengakses media-media tersebut. Media-media sosial sangat mudah digunakan mengingat fitur-fitur yang disediakan tidak rumit dan hampir sama di setiap media sosial yang ada. Media sosial dapat secara langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan budaya baru di masyarakat.

Beberapa masyarakat memiliki tradisi diskusi dan dialog yang dimulai dari kelompok masyarakat hingga lingkup pemerintahan yang lebih luas. Dalam proses dialog ini, partisipan dapat mempertukarkan pandangan dan informasi, serta saling belajar satu sama lain. Melalui tradisi diskusi

dan dialog seperti ini, masyarakat akan lebih sadar akan adanya pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Tradisi masyarakat yang bersifat terbuka, inklusif, dan transparan akan menjadi faktor penting dalam menunjang partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pengguna media sosial yang mengikuti akun media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berpendapat bahwa pengaruh media sosial terlihat pada bagaimana masyarakat berinteraksi, yakni dengan memberikan ruang diskusi yang lebih besar dan mudah dijangkau. Fenomena tersebut dapat menggalakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan diskusi, akan tetapi juga dapat menimbulkan potensi terjadinya polarisasi atau konflik.

Pembentukan dan pengalaman masyarakat memegang peran penting dalam menunjang publikasi informasi. Masyarakat yang terdidik dan memiliki kesadaran informasi yang baik akan mampu memproses, mendapatkan, dan menyebarkan informasi secara efektif. Selain itu, keberadaan media massa modern dan perkembangan teknologi informasi mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang ada.

Peneliti melakukan wawancara dengan pengguna media sosial yang mengikuti media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Beberapa masyarakat memiliki pengalaman positif dengan media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, terutama dalam hal mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Namun, ada juga masyarakat yang merasa bingung atau keberatan dengan isu-isu yang disajikan atau berkaitan dengan isu sensitif.

Pengalaman masyarakat dalam menunjang publikasi informasi juga dapat berupa kepekaan terhadap isu-isu yang mempengaruhi kepentingan publik. Dalam hal ini, masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya melalui media massa maupun daring, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah masyarakat selalu peka terhadap isu-isu yang ada media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Masyarakat mampu menjabarkan alasan mengapa konten-konten media sosial belum mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan. Beberapa dari sanggahan yang diajukan masyarakat merupakan keluhan kesah masyarakat tentang kinerja dan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo yang belum maksimal.

3.1.5. Effects

Media sosial memang menjadi kebutuhan utama dalam mendapatkan informasi. Namun, untuk konteks informasi pemerintahan, masyarakat tidak terlalu tertarik dengan media-media sosial yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini disebabkan konten-konten yang disediakan media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak menarik dan cukup membosankan. Tak seperti media sosial yang dikelola secara swasta, media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak terlalu efektif dalam memengaruhi masyarakat dari segi sosial, politik, dan budaya.

Dengan adanya media sosial pemerintah, masyarakat bisa mengetahui kegiatan atau program yang sedang dijalankan pemerintah. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

Proses komunikasi massa adalah suatu proses yang melibatkan komunikasi antara pengirim pesan media dengan publik atau khalayak yang menjadi target atau sasarannya. Model efek media adalah suatu teori mengenai bagaimana media dapat memengaruhi dan mempengaruhi pemikiran dan sikap publik atau audiens terhadap topik atau isu tertentu. Model-model tersebut berisi pola, prinsip, atau teori mengenai bagaimana media memengaruhi tindakan dan pemikiran manusia.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pengguna media sosial yang mengikuti media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peranan penting dalam mempercepat sirkulasi informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam diskusi. Namun, dampak yang dihasilkan oleh media sosial dapat menjadi positif atau negatif tergantung pada kualitas dan dukungan yang diberikan dalam mengelola isi konten.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan kemudahan akses yang tersedia menjadi pemicu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mempublikasikan informasi. Publikasi informasi dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi baru bagi masyarakat, sehingga dampak yang positif bisa terjadi dalam hal ini. Informasi yang terbuka dan transparan dapat menjadi penghubung antara suatu komunitas atau kelompok masyarakat dalam menjalin kerja sama atau mempertegas identitas masyarakat. Selain itu, publikasi informasi dapat pula digunakan sebagai sarana pengawasan dan kontrol sosial. Namun, publikasi informasi juga dapat memberikan dampak yang negatif dalam aspek sosial budaya: informasi yang front page akan sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Salah satu dampak negatif adalah berkembangnya hoax dan informasi palsu. Informasi palsu dapat berdampak negatif pada sosial budaya karena dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan, konflik, serta ketidakharmonisan dalam masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, Suyanto, St., M.Kom, pada 11 Januari 2023 mengenai dampak sosial budaya yang dihasilkan oleh media sosial. Dampak sosial dan budaya yang dihasilkan oleh media sosial, antara lain isu-isu sosial dan politik, meningkatnya pengaruh budaya populer, berkurangnya privasi, penyebaran informasi yang mudah dan lebih cepat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengguna media sosial tentang dampak sosial dan budaya dari media sosial yang dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan pada cara komunikasi dan interaksi, kerentanan terhadap serangan siber dan pelanggaran privasi, serta pengaruh opini publik pada isu politik dan sosial, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak buruk pada masyarakat. publikasi informasi harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab agar dampak yang terjadi adalah positif sehingga keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat terjaga. Publikasi informasi juga harus dilakukan dengan merujuk pada sumber yang dapat dipercaya agar tidak menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan, dan masyarakat dapat menerima informasi yang sebenarnya.

Opini publik dan komunikasi politik dalam publikasi informasi memiliki peran yang penting dalam proses demokrasi dan pembentukan kebijakan publik. Publikasi informasi adalah alat yang digunakan oleh pemerintah, partai politik, dan kelompok masyarakat untuk menyampaikan pesan politik mereka kepada khalayak.

Secara keseluruhan, opini publik dan komunikasi politik dalam publikasi informasi saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan dalam proses politik. Masyarakat memiliki peran penting dalam menyaring, mengevaluasi, dan merespons informasi politik yang mereka terima. Sementara itu, pemerintah dan partai politik perlu memastikan bahwa publikasi informasi yang mereka sampaikan adalah transparan, inklusif, dan akurat. Dengan demikian, opini publik yang terinformasikan dan komunikasi politik yang efektif dapat mendorong proses demokrasi yang sehat dan pembentukan kebijakan yang lebih baik.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pengguna media sosial yang mengikuti media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang opini mereka berkaitan dengan pemerintahan yang dilakukan pemerintah melalui media sosial dapat disimpulkan bahwa media sosial dapat memainkan

peran yang signifikan dalam membentuk opini publik dan pendapat dalam politik. Dalam era digital saat ini, media sosial memberikan platform untuk orang-orang untuk berbagi dan mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Namun, informasi yang tersebar di media sosial tidak selalu terverifikasi atau akurat, yang dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan memengaruhi pendapat publik. Selain itu, media sosial dapat membentuk filter bubble, di mana orang hanya terpapar pada pandangan-pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri.

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, Suyamto, St., M.Kom, pada 11 Januari 2023 mengenai komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat disimpulkan bahwa “salah satu fungsi media sosial dalam pemerintahan adalah proses komunikasi politik. Fungsi media sosial dalam memberikan informasi terkait kejadian politik di masyarakat adalah menyajikan informasi dengan objektif dan profesional, memperkuat saluran komunikasi masyarakat, mempertahankan kestabilan keadaan politik, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses politik.” Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan media sosial juga memiliki tantangan, seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi opini, dan ancaman privasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki literasi media yang baik dan melakukan verifikasi fakta sebelum mempercayai informasi yang ditemukan di media sosial.

Kesimpulan dari dimensi ini adalah pengaruh yang dihasilkan media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat berupa pengaruh positif atau negatif. Sebagian besar masyarakat mendapat pengaruh positif dari informasi yang di dapat. Sementara itu, masih ada yang berkomentar negatif terkait unggahan dari media sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

3.2. Faktor Penghambat Penggunaan Media Sosial Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Informasi kepada Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo

Setiap pelaksanaan kegiatan di daerah pastinya memiliki faktor penghambat selama kegiatan tersebut dilaksanakan. Semua pihak yang berkaitan berusaha untuk memperkecil dan menyelesaikan faktor menghambat dan menambah faktor pendukung demi berjalannya kegiatan tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi kepada masyarakat melalui media sosial terdapat kendala di antaranya:

1. Penyebaran Informasi yang Tidak Akurat

Salah satu masalah utama dengan media sosial adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Pemerintah harus berhati-hati dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui akun resmi mereka benar dan dapat dipercaya, karena informasi yang salah dapat menyebabkan kebingungan dan merugikan masyarakat.

Dampak dari penyebaran informasi yang tidak akurat dapat berdampak buruk pada masyarakat dan masyarakat. Masyarakat dapat salah paham, kebingungan, atau bahkan bertindak berdasarkan informasi yang salah, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan, perpecahan sosial, dan kerugian bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa memeriksa kebenaran dan akurasi informasi sebelum menyebarkannya, serta membangun literasi digital dan kritis dalam menghadapi informasi di dunia digital yang semakin kompleks ini.

2. Terbatasnya Akses dan Literasi Digital

Tidak semua orang memiliki akses ke media sosial, terutama di wilayah-wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Selain itu, tingkat literasi digital juga menjadi tantangan, di mana beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya memahami cara menggunakan media sosial dengan bijaksana dan kritis.

Terbatasnya akses dan literasi digital menjadi perhatian penting karena dunia semakin tergantung pada teknologi informasi. Kurangnya akses dan literasi digital dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan kesempatan, sehingga mengurangi potensi pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi

masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses teknologi dan menyediakan pendidikan serta pelatihan literasi digital kepada masyarakat yang membutuhkan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Publikasi informasi pemerintahan memainkan peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan tingkat transparansi pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat dalam keputusan penting yang dibuat pemerintah, memberikan akses informasi terbaru dari pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dalam satu kata, publikasi informasi pemerintahan sangat penting dalam meningkatkan keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal tersebut akan membantu mencapai tujuan-tujuan dari negara yang inklusif dan menjaga kesejahteraan rakyatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengoptimalkan publikasi informasi pemerintahan melalui media sosial di Kabupaten Sukoharjo. Model penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada lokasi penelitian sebagai teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Komunikasi Massa oleh Denis Mcquail dengan dimensi *Structure, Organizations, Content, Audiences*, dan *Effects*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengoptimalkan publikasi informasi pemerintahan masih perlu beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Hal-hal tersebut adalah perlunya pembaruan rutin yang tidak merata di setiap media sosial yang dimiliki, kemudian peningkatan kualitas konten agar dapat menarik perhatian masyarakat, serta memaksimalkan penyerapan anggaran dalam menunjang publikasi informasi pemerintahan.

IV. KESIMPULAN

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan berisi mengenai ringkasan tentang temuan dan analisis terhadap fokus penelitian. Berdasarkan penelitian dan pembahasan “ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO”, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pada dimensi structure, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah dilakukan dengan baik hampir di setiap aspek, hanya saja dari sisi tata kelola keuangan memang media sosial membutuhkan anggaran yang relatif kecil. Namun demikian, anggaran yang relatif kecil tersebut belum sepenuhnya terserap dan mengalami penurunan penyerapan anggaran dari tahun ke tahun.
2. Dalam hal keorganisasian, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mampu mengelola media sosial dengan baik sehingga tidak ada media sosial yang mati atau berhenti mengunggah konten-konten yang bersifat informasi.
3. Dimensi Content dalam penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mampu membuat konten-konten yang berkualitas. Kendala yang terjadi adalah untuk unggahan yang berupa video memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat terjadi penurunan kualitas dari segi aktualisasi.
4. Masyarakat sangat peka terhadap informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui media sosialnya. Masyarakat mampu melihat celah-celah kesalahan yang dilakukan oleh pengelola media sosial dan menyampaikannya lewat kolom komentar di setiap unggahan,
5. Sebagian besar masyarakat mendapatkan pengaruh positif terhadap informasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Namun masyarakat masih melihat isu-isu politik yang terkadang tersirat di beberapa informasi yang diunggah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu dan biaya penelitian, serta keterbatasan pada kemampuan penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis pengaruh media sosial pemerintah terhadap masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya dan seluruh pegawai Diskominfo Kabupaten Sukoharjo yang telah berkenan memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ikhwan. “Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Interaksi Sosial (Studi Kasus Pada Remaja Usia 16-19 Tahun Di Wilayah Kelurahan” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020.
[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51042%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51042/1/1113015000067_Ikhwan Afandi - Ikhwan Afandi.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51042%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51042/1/1113015000067_Ikhwan%20Afandi%20-%20Ikhwan%20Afandi.pdf).
- Anang, Sugeng Cahyono. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal ilmu sosial & ilmu politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung* 9, no. 1 (2016): 140–157. <http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73>.
- McQuail, Denis. *McQuail’s Mass Communication Theory*. 6th ed. Sage Publication Ltd, 2010.
- Novianti, Evi, Aat Ruchiyat Nugraha, Lukiati Komalasari, Kokom Komariah, and Diah Sri Rejeki. “Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran).” *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 11, no. 1 (2020): 48–59. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir>.
- Putri, Wilga Secsio Ratsja, Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti S. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2016).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Suhendar, A. “Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah & Menuju Good Governance, _.” *Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2008).

